

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2026



A. Ringkasan Eksekutif

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian/Tahun	November 2025
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan	
a. Penghimpunan Dana	Rp47.990.164.981,-
b. Penyaluran Dana	Rp33.721.936.631,-
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan	
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	Rp33.721.936.631,-
b. Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	Rp7.683.759.507,-
Persentasi Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap Total Kredit/Pembiayaan Bank (%)	81,44%

Uraian/Tahun	November 2025	
Jumlah dan Kualitas Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Nominal (IDR)	NPL (%)
a. Energi Terbarukan	Nihil	Nihil
b. Efisiensi Energi	Nihil	Nihil
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Nihil	Nihil
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	Nihil	Nihil
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati darat dan air	Nihil	Nihil
f. Transportasi Ramah Lingkungan	Nihil	Nihil
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	Nihil	Nihil
h. Adaptasi Perubahan Iklim	Nihil	Nihil
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (<i>Eco-efficient</i>)	Nihil	Nihil
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional atau Internasional	Nihil	Nihil
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	Nihil	Nihil
l. Kegiatan UMKM	Rp33.721.936.631,-	18,09%

2. Visi dan Misi

a. Visi

Bank yang terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan nilai tambah kepada Nasabah selaku mitra utama dalam layanan Keuangan Berkelanjutan
- 2) Menjadi Perusahaan yang peduli terhadap kepentingan Masyarakat dan lingkungan hidup
- 3) Mensejahterakan seluruh stakeholder melalui penerapan keuangan berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan penerapan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri keuangan.

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas Tata Kelola Bank dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup serta berfokus pada portofolio kredit UMKM dan

berwawasan lingkungan.

4. Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Rencana Aksi 1 Tahun

No	Bulan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Indikator Pencapaian
1	Januari s.d. Desember	Menetapkan target market share kredit dengan membiayai dan mendampingi pengusaha segmen UMKM	Meningkatkan portofolio kredit segmen UMKM dan sekaligus membantu mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Portofolio kredit segmen UMKM dengan kolektibilitas Lancar, meningkat.
2	Juli dan Desember	Refreshment dan update pemahaman mengenai RAKB untuk seluruh karyawan	Meningkatkan pemahaman PUK dan Staf mengenai RAKB	Seluruh karyawan paham dan mampu mengimplementasikan sesuai bidang kerjanya
3	Agustus	menyampaikan informasi mengenai kepedulian terhadap lingkungan dan Kesehatan melalui media digital (website) dan medsos	Informasi representatif mengenai potensi bahaya global warming, polusi udara dan polusi suara	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar dengan memulai dari kesadara diri.
4	November	Merencanakan pekerjaan/renovasi landscape kantor BPR dengan mengedepankan prinsip konsep ramah lingkungan (green building)	Menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan sesuai konsep green building	Menanam dan/atau dengan meletakkan tanaman hijau disekitar kantor baik di dalam ruangan maupun di luar area kantor

b. Rencana Aksi 5 Tahun

Tahun	Target	Indikator Pencapaian
2027	Pengembangan SDM Tingkat lanjut untuk mengelola keuangan berkelanjutan	Seluruh Pimpinan Cabang serta Pejabat Eksekutif khususnya Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan terkait AMDAL/manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup
	Membuat anggaran CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan	Penyaluran Dana CSR di bidang Kesehatan, sosial dan pelestarian lingkungan
	Membuat kebijakan yang berfokus pada tata cara atau kebiasaan dalam berorganisasi yang berhubungan dengan penghematan energi, penggunaan Listrik, air dan botol plastik dalam kegiatan internal bank	Berkurangnya biaya Listrik, air dan penggunaan kertas sebesar 10% dari tahun sebelumnya dan tidak ada lagi penggunaan botol plastik dalam acara rapat internal Bank.
2028	Meningkatkan penyaluran dana CSR	Program bantuan sarana dan prasarana untuk petani organik
	Pilot project pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Listrik	Portofolio kredit Maks. Rp200juta
	Pengadaan sepeda motor Listrik untuk kendaraan inventaris	Penggantian beberapa kendaraan inventaris ke sepeda motor Listrik
2029	Meningkatkan anggaran dana CSR	Program penanaman 20 pohon
	Desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	Meluncurkan produk pembiayaan khusus yang berfokus pada keuangan berkelanjutan dan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang memenuhi kriteria program hijau
2030	Membuat kebijakan dan pedoman paperless	Proses operasional dan bisnis dapat menerapkan metode paperless
	Mendigitalisasi proses bisnis bank	Meningkatkan efisensi dan efektifitas dalam proses bisnis dan operasional bank

5. Alokasi Sumber Daya

BPR membentuk Unit Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai pengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan dukungan dari anggota Direksi untuk melakukan pemantauan realisasi atas rencana keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan program dan aktivitas aksi keuangan berkelanjutan tersebut, Unit Aksi Keuangan Berkelanjutan merupakan tim gabungan dari PE Operasional, PE Kepatuhan & Manajemen Risiko, PE SDM dan Umum serta seluruh Pimpinan Cabang.

6. Penanggung Jawab Pelaksana Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian tugas dan tanggung jawab Unit Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Pejabat	Tugas dan Wewenang
Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keselarasan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam penyusunan strategi selaras dengan penerapan program usaha berkelanjutan 2. Memberikan persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun.
Direksi	Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan program aksi keuangan berkelanjutan secara keseluruhan
PE Kepatuhan & Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan 2. Memproyeksikan pertumbuhan kredit kepada kegiatan usaha berkelanjutan 3. Menyusun pedoman dan kebijakan keuangan berkelanjutan 4. Melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan aksi keuangan berkelanjutan
PE Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan 2. Menyusun laporan keuangan berkelanjutan 3. Mengadakan program terkait CSR
PE SDM dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh karyawan mengenai keuangan berkelanjutan 2. Membantu PE Operasional dalam memonitoring realisasi atas rencana aksi keuangan Berkelanjutan

Pimpinan Cabang	1. Penyaluran kredit kepada kegiatan usaha berkelanjutan
-----------------	--

Pejabat	Tugas dan Wewenang
	2. Memproyeksikan penyaluran kredit kepada sektor program hijau 3. Menyampaikan laporan realisasi atas penyaluran kredit kepada sektor program hijau 4. Mengelola program aksi keuangan berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk)

B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
- b. Pedoman Teknis bagi Bank terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

2. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan RAKB

Sebagai bentuk penerapan kepatuhan terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017, PT BPR Kandimadu Arta melakukan proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026, adalah:

1. Direksi
2. PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3. PE Operasional
4. PE SDM dan Umum
5. Pimpinan Cabang

Adapun dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini PT BPR Kandimadu Arta tidak menggunakan Jasa Konsultan.

C. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Rencana Strategis Bank

PT BPR Kandimadu Arta terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat khususnya UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Untuk menunjang hal tersebut PT BPR Kandimadu Arta melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah

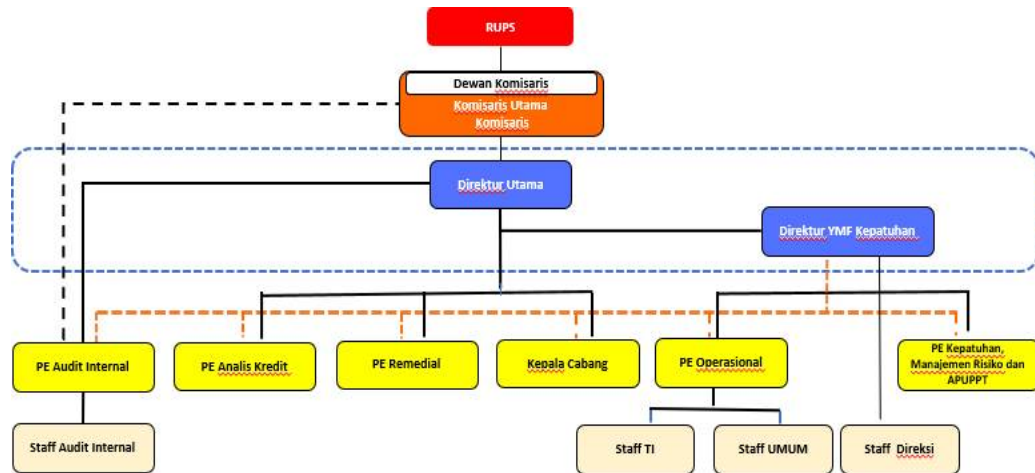
kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

2. Kapasitas Organisasi

a. Struktur Organisasi dan Manajemen

Di dalam upaya untuk mencapai visi dan misi PT BPR Kandimadu Arta selalu menyesuaikan struktur organisasi yang menyesuaikan dengan arah kebijakan dan pengembangan bisnis bank.

1) Struktur Organisasi



2) Daftar Pengurus

a) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Trisetya Wahyu Nugroho	Komisaris Utama
2	Yovita Wahyuni Indri Astuti	Komisaris

b) Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan
1	Sonny Laksana Nugraha	Direktur Utama
2	Sapto Hartono	Direktur YMF Kepatuhan

c) Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan
1	Hari Bian	Kepala Cabang – KPO
2	Tri Puji H	Kepala Cabang
3	Faisal DF	Kepala Cabang
4	Gunawan K	Kepala Cabang
5	Hery Setiawan	PE Audit Internal
6	Trisnu Kuswandono	PE Credit Officer
7	Satrio Dwi A	PE Remedial
8	Nur Riani Yusman	PE Kepatuhan, Manrisk dan APU PPT
9	Fauziana Nurul U	PE Operasional

b. Sumber Daya Manusia

Upaya untuk mencapai visi dan misi PT BPR Kandimadu Arta dilakukan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Setiap karyawan menjadi asset berharga yang secara berkelanjutan perlu ditingkatkan antara lain dalam hal kompetensi dan sikap kerja, serta profesionalisme untuk menumbuhkan rasa kenyamanan dan kebanggaan sebagai karyawan PT BPR Kandimadu Arta.

1) Jumlah dan Komposisi Karyawan

Seiring persaingan yang semakin meningkat, BPR melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. BPR juga senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional BPR dan tetap mengedepankan praktek ketenagakerjaan yang humanis.

a) Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doctoral (S-3)	-
2	Pasca Sarjana (S-2)	1
3	Sarjana (S-1)	42
4	Diploma (D3)	9
5	SMA/SMK	7
6	Lainnya	2

b) Jumlah dan komposisi berdasarkan status karyawan

No	Status Karyawan	Jumlah
1	Karyawan Tetap	38
2	Karyawan Kontrak	23

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

PT BPR Kandimadu Arta selalu berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan berdasar *Training In Needs* searah dengan tujuan perusahaan dan bisnis BPR, serta pelaksanaan *Manage Talent*.

Peningkatan kualitas SDM akan dilakukan dengan sebagai berikut:

- Mengikutsertakan ujian sertifikasi Direksi, Pejabat Eksekutif dan sertifikasi profesi di lingkungan bisnis perbankan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis BPR serta ketentuan regulator
- Meningkatkan kualitas pejabat dan karyawan yang bersertifikat dengan program penyegaran dan pelatihan lain khususnya yang bersinggungan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menambah wawasan, *analytical thinking*, dan memperkuat *team work*.
- Rekrutmen tenaga berpengalaman dan *fresh graduate*
- Mengkaji dan mengevaluasi kualitas karyawan serta mengikutsertakan program Pendidikan yang sesuai bidangnya, maupun melakukan *employee movement* (rotasi, mutasi, demosi,

promosi) dalam rangka penyegaran dan memperdalam kemampuan, membangkitkan etos kerja, dan *sense of belonging* dalam berorganisasi.

- Membuat rencana training tahunan sehingga program pembelajaran lebih terpola dan terstruktur.
- Menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan OJK yang berlaku untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan.

3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis yang dimiliki

Indikator Keuangan	Rasio
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23.90
Rasio Modal Inti terhadap keseluruhan modal	23.31
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang Bermasalah	65.67
Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	15.21
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100.00
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Neto	18.09
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Gross	18.73
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	80.29
Rasio <i>Return on Assets</i> (ROA)	-0.40
Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	8.73
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	103.20
<i>Cash Ratio</i> (CR)	12.71
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	85.72
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	11.16

4. Kerjasama dengan pihak eksternal

Dalam rangka untuk melaksanakan program RAKB PT BPR Kandimadu Arta berencana akan melakukan Kerjasama dengan Asosiasi Perbarindo dan pihak lainnya.

5. Strategi Komunikasi

PT BPR Kandimadu Arta senantiasa membangun komunikasi dua arah dalam rangka menjalin hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingan, baik komunikasi internal maupun eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi BPR dan kepercayaan pemangku kepentingan. BPR juga berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi sebagai landasan pelaksanaan aktivitas komunikasi dan pengelolaan media komunikasi melalui berbagai media sosial BPR, salah satunya melalui website BPR.

6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi dan memitigasi risiko terhadap pelaksanaan program kerja keuangan berkelanjutan, BPR telah memiliki sejumlah mekanisme yaitu sebagai berikut:

a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka monitoring perkembangan terkini terhadap berbagai program kerja dari seluruh unit kerja serta memonitoring kinerja keuangan dan non keuangan, serta isu-isu strategis, maka BPR Kandimadu Arta menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan diterbitkannya RAKB, maka cakupan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi juga akan membahas rencana dan evaluasi keuangan berkelanjutan.

b. Rapat Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif

Dalam rangka memastikan target bisnis dan RAKB, senantiasa diselenggarakan rapat secara rutin antara Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif untuk mengukur dan memonitoring kinerja bisnis, serta memberikan evaluasi yang lebih objektif dan terukur bagi masing-masing unit kerja.

7. Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang telah di gagas Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 sebagai implementasi *road map* Keuangan Berkelanjutan.

D. Proritas

1. Dasar Pemikiran

Pembentukan dan penguatan organisasi BPR menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi BPR.

2. Kegiatan

No	Kegiatan	Periode	Sumber Daya	Penanggung Jawab
1	Pembiayaan UMKM	Januari s.d. Desember	Unit yang terlibat : Unit Bisnis Alokasi Dana untuk disalurkan: Rp200juta/bln	Direktur Utama dan Pimpinan Cabang di tingkat Cabang
2	Sosialisasi bagi seluruh karyawan mengenai keuangan berkelanjutan	Juli dan Desember	Unit yang terlibat : SDM Alokasi Dana : Rp30juta	Direktur YMFK, PE Kepatuhan, bag SDM

No	Kegiatan	Periode	Sumber Daya	Penanggung Jawab
3	Informasi mengenai lingkungan, Kesehatan melalui media digital	Agustus	Unit yang terlibat : Unit Operasional dan TI Alokasi Dana : Rp0,-	PE Operasional, Bagian IT
4	Pekerjaan landscape kantor BPR dengan mengedepankan prinsip konsep green building	November	Unit yang terlibat : SDM Alokasi Dana : Rp10juta	Pimpinan Cabang

3. Sumber Daya

1	Sumber Dana	- Budget Operasional
2	SDM	- Direksi, Pimpinan Cabang, seluruh SDM kantor pusat dan Cabang
3	Mitra Kerja	- Kantor Cabang dan Pusat

4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

a. Mekanisme dan metode pengawasan

- Pengawasan dilakukan setiap bulan;
- Tujuan pengawasan untuk memastikan target pencapaian tiap aktivitas dan target portofolio dapat tercapai;
- Metode pemantauan dan laporan realisasi kredit;

b. Tindakan jika ada deviasi

- Analisa dan dilaporkan untuk memastikan aktivitas dapat Kembali sesuai dengan perencanaan atau dilakukan penyesuaian kebijakan dan SOP
- Pengawasan ketat termasuk dimasukkannya aktivitas RAKB dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai komitmen bersama dalam memberi pendanaan pada sektor keuangan berkelanjutan.

5. Tantangan dan Rencana ke Depan

- Tantangan : Pemahaman unit bisnis terhadap bisnis berkelanjutan yang memiliki risiko tinggi dan memberi dampak sosial lingkungan bagi Masyarakat
- Rencana : pelatihan unit bisnis terhadap bisnis keuangan berkelanjutan

E. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Pegawai, Pejabat, dan/atau Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) berada di bawah Direktur YMF Kepatuhan dan dievaluasi setiap akhir periode akhir kegiatan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program RAKB bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program RAKB, termasuk

tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara spesifik peran Direksi dibantu oleh seluruh pejabat eksekutif khususnya kepatuhan dan manajemen risiko dalam melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai kerangka penerapan manajemen risiko.

2. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB

Untuk memastikan efektivitas realisasi RAKB diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi RAKB diatur sebagai berikut:

Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Pemantauan realisasi RAKB tahun berjalan	Triwulan	Direksi, PE Operasional, Pimpinan Cabang dan PE Kepatuhan
RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)	Akhir November Tahun Berjalan	Direksi PE Operasional, Pimpinan Cabang, dan PE Kepatuhan
Laporan Keberlanjutan	Paling Lambat Akhir Mei Tahun Berikutnya	PE Operasional, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko

3. Tindak lanjut RAKB

Dalam hal RAKB belum dapat terealisasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka BPR akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya;
- b. Melakukan revisi atas RAKB dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

4. Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan RAKB, BPR melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau SOP yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dengan generasi yang akan datang, sehingga usaha BPR yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.

- b. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan berkelanjutan
- 1) Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud.
 - 2) Merancang dan mengimplementasikan program kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus BPR dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi keuangan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka menengah program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 - 3) Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program-program keuangan berkelanjutan. Penyiapan sumber daya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
- c. Penyaluran Kredit berbasis Lingkungan
- 1) Meningkatkan portofolio pembiayaan pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial
 - 2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan, terutama pada karyawan di bagian bisnis dan analisa kredit.
 - 3) Menguatkan kolaborasi dan koordinasi BPR dengan sektor industry hijau, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta.
 - 4) Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal BPR. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai BPR masih tinggi dan tuntutan Masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 - 5) Merancang pemberian insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan pada lingkungan hidup.
- d. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek berkelanjutan dalam aktivitas operasional BPR
- Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan cara mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi Masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang.

- e. Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang searah dengan program RAKB
- 1) Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatan yang mengacu pada CSR dibawah monitoring dan evaluasi Direksi demi menekankan perlunya komitmen keberlanjutan dalam melaksanakan aktivitas CSR
 - 2) Mitigasi risiko dibidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan yang mengacu pada program CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko.
 - 3) Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan setelah BPR memperoleh profit, sehingga kegiatan yang mengacu pada program CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

F. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT BPR Kandimadu Arta Tahun 2026-2030 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Karanganyar, 12 Desember 2025

PT BPR Kandimadu Arta



Sonny Laksana Nugraha
Direktur Utama

Sapto Hartono
Direktur YMF Kepatuhan